



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN

TAHUN 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS PERTANIAN

Jl. Raya Parigi Karangbenda Parigi-Pangandaran

Fax/Telp. (0265) 2640200 Email: distanpangandaran@yahoo.com

Kode Pos 46393

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PERTANIAN KABUPATEN

PANGANDARAN

NOMOR : 050/ 429/DISTAN/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB III
ISI DAN URAIAN KERJA

Pasal 3

Isi dan uraian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV KETENTUAN
PERALIHAN Pasal 4

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2018 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2018

BAB V KETENTUAN
PENUTUP Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal, 20 Agustus 2018
Pit. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN,

JUHENDI, B.SC.F..M.P.

Pembina /IV-a
NIP. 19610412 198903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Illahi Rabbi karena atas perkenan-Nya penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan.

Perubahan RENJA Dinas Pertanian tahun 2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian untuk anggaran perubahan tahun 2018, yang disusun antara lain berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Perubahan RENJA ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Pertanian harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian.

Pangandaran, 20 Agustus 2018

Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN,



JUHENDI, B.SC.F.,M.P.

Pembina /IV-a

NIP. 19610412 198903 1 007

**BAB III****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian merupakan penjabaran dari misi kabupaten no enam yaitu “Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan” dimana Dinas Pertanian Erat kaitannya dengan kontribusi terhadap Pertumbuhan PDRB, yang kemudian dijabarkan kedalam IKU Dinas Pertanian yaitu sebagai berikut:

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN/FORMULASI | SUMBER DATA |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------|--|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| MISI KEENAM : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Produksi Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi | % | $\frac{\text{Produksitahun}(n) - \text{Produksitahun}(n-1)}{\text{Produksitahun}(n-1)} \times 100\%$ | Dinas Pertanian |

IKU Dinas Pertanian dijabarkan kedalam Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian yaitu sebagai berikut :

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET TAHUN 2018 |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Meningkatkan Produktivitas Pertanian | Persentase Peningkatan Produktivitas | | | | |
| | | | Meningkatnya Produksi Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi | % | 2 |

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didukung oleh beberapa program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah



untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2018 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2018. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Ada 2 (dua) rincian kategori program/kegiatan Dinas Pertanian berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, yaitu :

1. Program/Kegiatan Prioritas

Program/Kegiatan Prioritas adalah program/kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, harus selesai pada tahun rencana, target capaian harus terukur pada skala maksimal atau ideal, dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut.

Adapun rincian program/kegiatan prioritas urusan pertanian berdasarkan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dengan jumlah anggaran Rp960.000.000,00 hasil yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kemitraan Usaha Tani sebanyak 5 kerjasama yang diimplementasikan kedalam 3 Kegiatan yaitu :
 1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah, dengan jumlah anggaran Rp250.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah event yang diikuti sebanyak 7 event;
 2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (Banprov), dengan jumlah anggaran Rp260.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 200 orang peserta bimtek dan 10 jenis alat pengolahan hasil produksi (pasca panen);



3. Fasilitas Sarana dan Kelembagaan Unit Pemasaran Poktan/Gapoktan (UPPG) (Banprov), dengan jumlah anggaran Rp500.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 150 orang peserta bimtek, 13 jenis sarana pengepakan dan pemasaran, 6 unit motor roda tiga.
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan jumlah anggaran Rp4.775.379.920,00 hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 3%, meningkatnya produksi komoditi perkebunan sebesar 4% yang diimplementasikan kedalam 11 kegiatan yaitu :
1. Komisi Pengawas Penyedia Pupuk dan Pestisida, dengan jumlah anggaran Rp61.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 2 kali Pelaksanaan rakor KP3, 2 kali monev ke kios pupuk dan pestisida dan 2 uji sampel pupuk dan pestisida;
 2. Penyusunan Statistik Perkebunan, dengan jumlah anggaran Rp117.936.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen statistik;
 3. Monitoring dan Evaluasi UPSUS PAJALE, dengan jumlah anggaran Rp53.746.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan pelaksanaan monev padi seluas 1.085 Ha, jagung 109 Ha, Kedelai 475 Ha ;
 4. Monitoring dan Evaluasi UPSUS Cabe, dengan jumlah anggaran Rp11.877.920,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan pelaksanaan monev;
 5. Pendukung Cetak Sawah Baru, dengan jumlah anggaran Rp85.433.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 1.000 m pipanisasi dan 1 paket sarana pendukung;
 6. Pengembangan Sumber-sumber Air (Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit) (DAK), dengan jumlah anggaran Rp1.575.387.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 10 unit dam parit;
 7. Pengembangan Tanaman Jeruk (Banprov), dengan jumlah anggaran Rp550.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 8.000 batang bibit jeruk, 8.000 Kg NPK Non Subsidi, 1 unit kendaraan roda dua;
 8. Pengembangan Tanaman Manggis dan Tanaman Durian (Banprov), dengan jumlah anggaran Rp500.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 3.000 batang bibit manggis, 3.000 batang bibit durian, 66.000 Kg Pupuk NPK Non Subsidi, 1 unit kendaran roda dua;
 9. Pengembangan Budidaya Tanaman Cabai (Banprov), dengan jumlah anggaran Rp800.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 300 pak benih cabai, 24.000 Kg Pupuk NPK Non Subsidi, 60.000 Kg Pupuk



Organik Non Subsidi, 280 rol plastik mulsa, 40.000 Kg kaptan, 100 lt insektisida, 100 Kg fungisida, 1 unit kendaraan roda dua;

10. Pengadaan Benih dan Pengadaan Pestisida (Banprov), dengan jumlah anggaran Rp250.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 10.000 Kg benih padi in hibrida, 60Lt insektisida, 420Kg rodentisida, 50Kg fungisida;
11. Pengembangan POS Penyuluhan Pedesaan (POSLUHDES) (Banprov), dengan jumlah anggaran Rp770.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 22 unit sistem jarkomluhdes.
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan jumlah anggaran Rp850.984.000,00 hasil yang ingin dicapai dari program ini adalah 0,28% penumbuhan kelompok tani, 20% peningkatan klasifikasi/kelas kelompok yang diimplementasikan kedalam 2 kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian(BOP), dengan jumlah anggaran Rp766.984.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah penerima bop : 23 orang penyuluh pertanian, 13 orang petugas IB, 11 orang admin simluhtan, 32 orang THL, 93 orang penyuluh swadaya. 103 dokumen program penyuluhan;
 2. Bantuan Operasional Penyuluh (banprov), dengan jumlah anggaran Rp84.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 14 orang penerima bop.
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan jumlah anggaran Rp138.100.000,00 hasil yang ingin dicapai dari program ini adalah menurunnya kasus penyakit ternak sebesar 3% yang diimplementasikan dalam kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, dengan jumlah anggaran Rp138.100.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 4 jenis obat.
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan jumlah anggaran Rp144.647.000, hasil yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya produksi komoditi peternakan sebesar 0,85% yang diimplementasikan kedalam dua kegiatan yaitu :
 1. Optimalisasi Data Peternakan, dengan jumlah anggaran Rp124.800.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen database populasi ternak;
 2. Monitoring dan Evaluasi UPSUS SIWAB, dengan jumlah anggaran Rp19.847.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 12 bulan pelaksanaan monev, populasi 15.376 ekor, Potensi akseptor IB 7.189 ekor, target bunting 6.442 ekor, Target IB 5.283 ekor.
6. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan jumlah anggaran Rp117.058.000,00 hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini



adalah Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar 3% yang diimplementasikan kedalam kegiatan Penyusunan Database Potensi Produk Pangan, dengan jumlah anggaran Rp117.058.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen database potensi produk pangan.

7. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku, dengan jumlah anggaran Rp1.161.432.700,00 hasil yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya kualitas tembakau pangandaran yang diimplementasikan kedalam empat kegiatan yaitu :
 1. Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku (DBHCHT), dengan jumlah anggaran Rp204.400.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 1 unit gudang pengolahan produksi;
 2. Pembangunan Saluran Air (DBHCHT), dengan jumlah anggaran Rp198.100.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 1 unit saluran air limbah;
 3. Pembuatan Sumur Bor/Pantek (DBHCHT), dengan jumlah anggaran Rp601.432.700 keluaran dari kegiatan ini adalah 6 unit sumur bor;
 4. Pembangunan Jalan Produksi (DBHCHT), dengan jumlah anggaran Rp157.500.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 230m jalan produksi.

2. Program/Kegiatan Rutin (Non Urusan)

Program/Kegiatan Rutin (Non Urusan) adalah kegiatan yang pelaksanaan dan penyelenggaraannya wajib dan bersifat rutin berulang setiap tahun, dengan maksud, tujuan, volume, anggaran dan output relatif tetap atau sama, yang apabila tidak dianggarkan berdampak eksistensial pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Program/kegiatan ini merupakan dasar dari organisasi perangkat daerah untuk melakukan semua kegiatan dasar yang menunjang keberlangsungan organisasi.

Adapun rincian Program/Kegiatan Rutin (Non Urusan) Dinas Pertanian berdasarkan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp548.065.900,00 hasil dari program ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 90% yang diimplementasikan ke dalam 11 kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan jumlah anggaran Rp3.999.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah pengelolaan surat menyurat sebanyak 2.100 buah;
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan jumlah



anggaran Rp94.800.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah pembayaran 16 rekening jasa sumberdaya setiap bulan;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran Rp17.500.100,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 13 unit Kendaraan yang berizin;
 4. Penyediaan alat tulis kantor dengan jumlah anggaran Rp99.578.800,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 92 Jenis ATK yang dibeli;
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan jumlah anggaran Rp14.370.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 6 Jenis Barang yang di cetak dan digandakan;
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan jumlah anggaran Rp6.500.500,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 19 Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli;
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran Rp26.182.500,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 2 Jenis dan 2184 eksemplar bahan bacaan yang dibeli;
 8. Penyediaan makanan dan minuman dengan jumlah anggaran Rp29.305.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 2 Jenis dan 1674 dus makanan dan minuman yang dibeli;
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan jumlah anggaran Rp108.280.000,00 keluaran 60 kali Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti;
 10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan jumlah anggaran Rp25.150.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 2 orang SDM Keamanan setiap bulan;
 11. Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga dengan jumlah anggaran Rp122.400.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 9 orang SDM penunjang kegiatan perkantoran setiap bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp313.307.234,00 hasil dari program ini adalah Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 90% yang diimplementasikan kedalam 6 kegiatan yaitu sebagai berikut :
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp38.795.919,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 3 jenis, 6 unit perlengkapan gedung kantor yang dibeli;



2. Pengadaan mebeleur dengan jumlah anggaran Rp41.650.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 5 jenis, 42 buah mebeleur yang dibeli;
 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp56.693.906,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 1 unit dan 405m² gedung kantor yang dipelihara;
 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan jumlah anggaran Rp53.171.500,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 2 jenis, 9 unit kendaraan yang dipelihara;
 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp2.995.909,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 2 jenis, 6 unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara;
 6. Penyediaan gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp120.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 1 unit Gedung Kantor.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan jumlah anggaran Rp146.602.084,00 hasil dari program ini adalah Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik sebesar 90% :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah anggaran Rp20.000.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 5 dokumen laporan kinerja;
 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan jumlah anggaran Rp1.345.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan keuangan semesteran;
 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan jumlah anggaran Rp1.981.100,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun;
 4. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD dengan jumlah anggaran Rp61.175.984,00 keluaran dari kegiatan ini adalah 7 dokumen perencanaan;
 5. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran Rp32.800.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah honor 1 SDM Operator keuangan setiap bulan;
 6. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah dengan jumlah anggaran Rp29.300.000,00 keluaran dari kegiatan ini adalah honor 1 SDM Operator BMD setiap bulan.



Untuk lebih jelasnya mengenai rencana kerja dan pendaan Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel T.C-33 (terlampir)

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Proses penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2018 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJM Provinsi Jawa Barat, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun perubahan program/kegiatan SKPD tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran tahun 2018 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN,



JUHENDI, B.SC.F.,M.P.

Pembina /IV-a

NIP. 19610412 198903 1 007